Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Volume 8, Nomor 1, September 2026
E-ISSN : 2827-9948

PERAN BIDANG KBKK DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DINAS P3AKB KABUPATEN SIDOARJO

Siti Nur Rodiyah [1*], Indah Murti [2]

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya [1, 2]

[*] *Corresponding author: diyah132508@gmail.com*

ARTICLE INFO
Submitted:
June 16, 2026
Review:
June 21, 2026
Accepted:
July, 23, 2026
Available online:
September 30, 2026

Sitasi Artikel (APA) : Rodiyah, S., & Murti, I. (2026). PERAN BIDANG KBKK DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DINAS P3AKB KABUPATEN SIDOARJO. *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *8*(1), 1-16. https://doi.org/10.37858/aktivasi.v8i1.702

DOI: *https://doi.org/10.37858/aktivasi.v7i1.702*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas keluarga. Keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, tetapi juga oleh efektivitas administrasi, pengelolaan data, dan koordinasi antarunit. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK) dalam mendukung pelaksanaan program KB di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, partisipasi langsung dalam kegiatan, dokumentasi, dan analisis terhadap pelaksanaan administrasi selama kegiatan pengabdian berlangsung. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa Bidang KBKK memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Kegiatan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok Pikiran (Pokir) menjadi sarana penting dalam menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pengelolaan data dan koordinasi antarunit yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem administrasi, integritas data, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan program KB secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Administrasi Publik, KBKK

ABSTRACT

The Family Planning (KB) Program is one of the government's strategic policies to control population growth while improving family quality. The success of program implementation is determined not only by field implementation but also by the effectiveness of administration, data management, and inter-unit coordination. This article aims to analyze the role of the Family Planning and Family Resilience (KBKK) Division in supporting the implementation of the KB program at the Women's Empowerment, Child

Protection, and Family Planning Office (DP3AKB) of Sidoarjo Regency. The method used is a qualitative descriptive approach through observation, direct participation in activities, documentation, and analysis of administrative implementation during the community service activities. The results of this community service activity indicate that the KBKK Division plays a significant role in supporting program implementation. Activities such as the Development Planning Deliberation (Musrenbang) and Main Ideas (Pokir) are important means of conveying program information to the public. However, there are still obstacles in data management and suboptimal coordination between units. Therefore, it is necessary to improve the administration system, data integrity, and strengthen human resource capacity to support the success of the KB program more effectively and sustainably.

Keywords: *Family Planning, Public Administration, KBKK*

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu aspek penting dalam Pembangunan tersebut adalah pembanguan di bidang kependudukan dan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam Masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, sehingga keberadaan keluarga yang Sejahtera dan berkualitas menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan (Utomo et al., n.d.). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui perencanaan kelahiran, kesehatan reproduksi, dan pembangunan ketahanan keluarga. Dalam implementasinya, keberhasilan Program KB sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat (Telaumbanua et al., n.d.). Oleh karena itu, implementasi Program KB memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat agar tujuan program dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi Program Keluarga Berencana dari berbagai perspektif. Penelitian Febriyani Tiffani et al. (2020) menyoroti implementasi Program KB dalam upaya menekan pertumbuhan penduduk, sedangkan Amalia Lifianti, (2021) mengkaji implementasi Program Kampung KB sebagai strategi integrasi pembangunan keluarga dan kependudukan. Penelitian lainnya juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program KB, seperti komunikasi kebijakan, partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan kualitas pelayanan publik (Atoul Ibad & Megawati, n.d.). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program KB sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan program secara tepat sasaran. Selain itu, program keluarga berencana juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan kesehatan keluaraga (Rahmawati Emha et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi Program Keluarga Berencana, sebagian besar penelitian masih

berfokus pada efektivitas program, partisipasi masyarakat, peran penyuluh lapangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Kajian mengenai peran unit kerja internal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, data, dan koordinasi program masih relatif terbatas. Padahal, dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga oleh kualitas sistem administrasi dan dukungan organisasi yang menjadi fondasi pelaksanaan program.

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana melalui pengelolaan administrasi, pengelolaan data, koordinasi kegiatan, serta pelayanan kepda masyarakat program Kampung KB menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengintegrasikan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Amalia Lifianti, 2021).

Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi juga diperoleh oleh sistem administrasi dan koordinasi yang berjalan di dalam organisasi. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi (Karodita Sari et al., n.d.) .Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantuk pada kegiatan dilapangan, tetapi juga pada system pendukung yang berjalan di dalam organisasi. Dengan demikian, peran unit kerja yang berfungsi sebagai pendukung administratif menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ada berbagai kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu pengelolaan data yang belum sepenuhnya terintegrasi hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, penyampaian informasi yang belum optimal hal ini dapat menghambat pemahaman Masyarakat terhadap program yang dijalankan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa peran Bidang KBKK sebagai unit pendukung masih perlu diperkuat agar mampu mendukung pelaksanaan program secara maksiamal.

DP3AKB Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk (Susana et al., n.d.). Salah satu bidang yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK). Bidang ini berperan dalam pengelolaan administrasi, penyediaan data program, penyusunan laporan, serta koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Berencana. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti pengelolaan data yang belum sepenuhnya terintegrasi serta koordinasi antarunit kerja yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. (Azizah1 et al., n.d.).

Pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting dakam mendukung keberhasilan program pemerintah karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Nuna et al., 2026). Dalam pelaksanaan program di tingkat daerah, Bidang KBKK memiliki fungsi penting dalam mendukung proses administrasi dan pengelolaan data program. Data yang dikelola menjadi dasar dalam penyusunan laporan, evaluasi program, serta pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan keluarga berencana. Pengelolaan data yang baik dapat membantu instansi dalam menentukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksaan program di masyarakat. Selain pengelolaan data, koordinasi antarunit juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Kegiatan seperti Musrenbang dan Pokir menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintah membutuhksn kerja sama antar berbagai pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat. Koordinasi yang baik dapat membantu pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Partisipasu masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi Program.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti pengelolaan data yang belum sepenuhnya terintegrasi dan koordinasi antarunit kerja yang belum optimal. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam proses administrasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sisten administrasi dan penguatan koordinasi agar pelaksanaan Program Keluarga Berencana dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bidang KBKK dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran administrasi publik dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah di bidang keluarga berencana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis peran Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK) dalam mendukung implementasi Program Keluarga Berencana di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bidang KBKK dalam pelaksanaan fungsi administrasi, pengelolaan data, dan koordinasi program, serta (3) menganalisis peran Bidang KBKK berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III guna menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan efektivitas implementasi Program Keluarga Berencana di tingkat daerah (Kurniasih et al., 2023).

Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK), selama 30 hari kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami secara langsung peran Bidang KBKK dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dimana peneliti mengumpulkan data melalui partisipasi langsung di lapangan dan melakukan analisis secara induktif (Creswell, 2009). Dengan pendekatan ini, penulis dapat memahami secara menyeluruh bagaiman peran Bidang KBKK dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Subjek penelitian

Subjek penelitian meliputi pegawai Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK) DP3AKB Kabupaten Sidoarjo yang terlibat dalam pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan data Ti, Pendamping Keluarga (TPK), penyusunan laporan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan Pokok Pikirian (Pokir) juga menjadi fokus pengamatan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan adminsitrasi dan koordinasi Program Keluarga Berencana.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui beberapa teknik yaitu:

1. Observasi, dengan mengamati secara langsung aktivitas administrasi, pengelolaan data, koordinasi program, serta pelaksanaan kegiatan Musrenbang dan Pokir.
2. Partisipasi langsung, keterlibatan dalam membantu proses adminsitrasi, pembaruan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyusunan dokumen sehingga diperoleh pemahanan nyata menganai pelaksanaan tugas Bidang KBKK
3. Dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumentasi laporan kegiatan, serta data pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tuga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil observasi, dokumentasi, dan partisipasi langsung diseleksi, dikelompokkan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi peran Bidang KBKK, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Selanjutnya, hasil analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu belum optimalnya pengelolaan dan pembaruan data Tim Pendamping Keluarga (TPK), perlunya peningkatan ketertiban administrasi program, serta kebutuhan akan dukungan data dan administrasi dalam kegiatan perencanaan program seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok Pikiran (Pokir). Permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Berencana karena data dan administrasi merupakan komponen penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini berupa pendampingan administrasi dan pengelolaan data pada Bidang KBKK. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan rekapitulasi, pembaruan, dan pengecekan data Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna meningkatkan ketepatan dan ketersediaan data. Selain itu, dilakukan pula pendampingan dalam penyusunan dokumen administrasi, pengarsipan dokumen program, serta dukungan administrasi pada kegiatan Musrenbang dan Pokir. Solusi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan data, ketertiban administrasi, serta efektivitas koordinasi program.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra, pelaksanaan pendampingan administrasi dan pengelolaan data, keterlibatan dalam kegiatan Musrenbang dan Pokir, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui manfaat kegiatan serta mengidentifikasi kendala yang masih ditemukan selama proses pelaksanaan program berlangsung. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan data dan administrasi pada Bidang KBKK sehingga dapat mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo memberikan pengalaman dan pemahaman secara langsung mengenai pelaksanaan administrasi publik, khususnya pada Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK). Selama kegiatan berlangsung, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan data, koordinasi kegiatan, serta pelaksanaan Program Keluarga Berencana di tingkat daerah. Kegiatan yang dilakukan selama pengabdian memberikan gambaran bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem administrasi dan koordinasi yang berjalan di dalam instansi. Bidang KBKK memiliki peran penting sebagai unit pendukung yang membantu pelaksanaan program melalui pengelolaan administrasi, penyediaan data, dan koordinasi kegiatan.

A. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Salah satu kegiatan yang diikuti selama pengabdian adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang merupakan forum perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan pemerintah dan masyarakat (Moonti & Dai, n.d.). Dalam kegiatan ini, Bidang KBKK berperan sebagai narasumber yang menyampaikan materi terkait permasalahan stunting. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman bahwa program keluarga berencana memiliki keterkaitan erat dengan upaya pencegahan stunting, khususnya dalam hal perencanaan jumlah dan jarak kelahiran anak, penulis juga memperoleh pemahaman bahwa pelaksanaan Program Keluarga Berencana memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyampaian informasi yang dilakukan kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan keluarga, pemanfaatan teknologi dan media digital juga dapat menjadi strategi pendukung dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan pemberdayaan masyarakat (Pusnita Indah et al., 2022). Kegiatan Musrenbang ini mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh narasumber menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan Musrenbang juga menunjukkan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah (Purwaningsih, 2022). Dengan adanya koordinasi yang baik, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

B. Kegiatan Pokok Pikiran (Pokir)

Selain Musrenbang, penulis juga mengikuti kegiatan Pokok Pikiran (Pokir) yang merupakan bagian dari program kerja DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Bidang KBKK berperan sebagai pendukung dalam penyediaan data, administrasi, serta koordinasi kegiatan.melalui kegiatan ini, penulis memahami bahwa

perencanaan program tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan DPRD sebagai wakil masyarakat. Aspirasi yang diperoleh dalam kegiatan ini menjadi dasar dalam penyusunan program pemerintah daerah (Irsyadillah et al., 2025). Kegiatan Pokir juga menunjukkan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.



Gambar 2. Pokok Pikiran (Pokir)

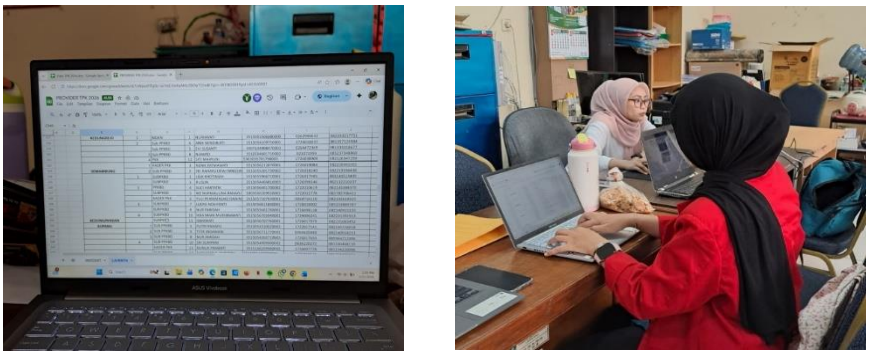
Pelaksanaan kegiatan Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokir) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Keluarga Berencana tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem komunikasi dan koordinasi anatarinstansi. Dalam perspektif implementasi kebijakan, komunikasi yang baik dapat membantu penyampaian informasi program kepada masyarakat sehingga tujuan program dapat dipahami dengan lebih efektif (Pradnyani et al., 2023).

Selain itu, pengelolaan data yang dilakukan oleh Bidang KBKK menunjukkan pentingnya ketersediaan sumber daya administrasi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Data yang terorganisir dengan baik dapat membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara lebih tepat sasaran. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya integrasi data dan koordinasi antarunit kerja sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Mubarok et al., 2020). Dengan demikian, peran Bidang KBKK sebagai unit pendukung administrasi memiliki kontribusi penting dalam mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo.

C. Pengelolaan Data Tim Pendamping Keluarga (TPK)

Pengelolaan data merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan selama pengabdian. Penulis terlibat dalam kegiatan rekapitulas data Tim Pendamping Keluarga

(TPK) di setiap kecamatan. Data TPK sebagai bahan administrasi, pelaporan, serta pendukung dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Selama kegiatan berlangsung, penulis juga memperoleh pengalaman dalam penggunaan Microsoft Excel dan Microsoft Word untuk mendukung kegiatan administrasi. Penggunaan aplikasi tersebut membantu proses pengolahan data dan penyusunan laporan agar lebih sistematis dan efisien. Temuan menunjukkan bahwa data memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program secara terarah dan terorganisir. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pengelolaan data, seperti belum optimalnya sistem yang digunakan sehingga diperlukan peningkatan dalam sistem pengelolaan data agar lebih terintegrasi.



Gambar 3. Pengelolaan Data Tim Pendamping (TPK)

D. Implementasi Solusi dalam Mengatasi Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil identifikasi awal, Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK) DP3AKB Kabupaten Sidoarjo mengahadapi beberapa permasalahan, yaitu belum optimalnya pembaruan edan validasi data Tim Pendamping Keluarga (TPK), administrasi program yang belum tertata secara konsisten, serta koordinasi penyediaan data untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok Pikiran (Pokir) yang masih memerlukan penguatan. Permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan, kurang akuratnya data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta menurunkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Sebagai upaya penyelesaian, dilakukan pendampingan administrasi secara langsung kepada Bidang KBKK melalui beberapa kegiatan aplikatif. Pertama, dilakukan rekapitulasi, verifikasi, dan pembaruan data Tim Pendamping Keluarga (TPK) berdasarkan data terbaru dari setiap kecamatan sehingga data yang tersedia menjadi lebih lengkap dan muthakir. Kedua, dilakukan penataan dokumen administrasi melalui pengelompokan arsip sesuai jenis kegiatan dan periode pelaksanaan sehingga proses pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan sistematis (Hernitawati & Pasaribu Azhar, 2025). Ketiga, diberikan dukungan administrasi dalam penyusunan dokumen pendukung kegiatan Musrenbang dan Pokir, termasuk penyiapan data yang dibutuhkan

sebagai dasar penyusunan usulan program. dilakukan penataan dokumen administrasi melalui pengelompokan arsip sesuai jenis kegiatan dan periode pelaksanaan sehingga proses pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan sistematis. Ketiga, diberikan dukungan administrasi dalam penyusunan dokumen pendukung kegiatan Musrenbang dan Pokir, termasuk penyiapan data yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan usulan program.

Implementasi solusi tersebut memberikan hasil yang positif terhadap proses administrasi di Bidang KBKK. Pembaruan data TPK meningkatkan ketepatan dan ketersediaan informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan maupun evaluasi program. Penataan dokumen administrasi membantu pegawai memperoleh dokumen yang diperlukan secara lebih cepat, sedangkan dukungan administrasi pada kegiatan Musrenbang dan Pokir memperlancar proses koordinasi antarunit serta penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan tidak hanya membantu menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga memperkuat sistem pendukung implementasi Program Keluarga Berencana di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo.

Hal tersebut menunjukkan bahwa solusi yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi, kualitas data, dan koordinasi kelembagaan. Penguatan pada aspek-aspek tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi Program Keluarga Berencana secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengsn perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan suatu kebijakan. (Rahim, n.d.)

E. Peran Bidang KBKK Sebagai Unit Pendukung

Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK) memiliki peran sebagai sekretariat dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. Dalam peran ini, Bidang KBKK tidak bertindak sebagai pelaksana utama di lapangan, melainkan sebagai unit pendukung yang bertanggung jawab dalam aspek adminsitrasi, pengelolaan data, serta fasilitasi kegiatan program. Perat sekretariat ini menjadi penting karena berfungsi sebagai penghubung antara kegiatan teknis di lapangan dengan sistem administrasi yang ada di dalam instansi. Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang KBKK meliputi penyusunan laporan, pengarsipan dokumen, serta pengelolaan data yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana. Data yang dikelola menjadi dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi progrsm. Oleh karena itu, keakuratan dan kelengkapan data menjadi hal yang sangat penting agar program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, Bidang KBKK juga berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok Pikiran (Pokir). Dalam kegiatan tersebut, Bidang KBKK bertugas menyiapkan administrasi, menyediakan data pendukung, serta membantu kelancaran kegiatan. Peran ini menunjukkan bahwa sekretariat memiliki kontribusi penting dalam memastikan

kegiatan berjalan dengan tertib dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Peran sebagai sekretariat juga mencerminkan pentingnya sistem administrasi dalam mendukung keberhasilan suatu program. Meskipun tidak secara langsung oleh masyarakat, fungsi sekretariat memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan program agar tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan administrasi yang tertata, pelaksanaan program di lapangan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkoordinasi.

Hasil Pengabdian yang dilakukan oleh praktikan selama 30 Hari Kerja yaitu pengalaman dan juga wawasan dalam bidang administrasi publik, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Selama 30 hari pelaksanaan kegiatan pengabdian, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan data di Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK). Hasil kegiatan tersebut sejalan dengan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, dimana praktik di lapangan memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana suatu program pemerintah dijlankan serta didukung oleh sistem administrasi yang ada di dalam instansi.

1. *Hard Skill*
    a. Penulis memahami proses administrasi yang dilakukan di bidang KBKK, seperti pengarsipan dokumen, pengelolaan data, serta penyusan laporan kegiatan.
    b. Penulis terlibat dalam kegiatan rekapitulasi data Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi program keluarga berencana.
    c. Penulis mampu mengoperasikan Microsoft Excel dan Microsofft Word dalam mendukung kegiatan administrasi.
    d. Penulis memahami alur perencanaan program melalui keterlibatan dalam kegiatan Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokir).

    Kemampuan tersebut memberikan pengalaman nyata kepada penulis mengenai pelaksanaan administrasi publik di lingkungan instansi pemerintah.

2. *Soft Skill*
    a. Meningkatkan kemampuan komunikasi dalam lingkungan kerja.
    b. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam tim.
    c. Meningkatkan kedisplinan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.
    d. Memperoleh pengalaman nyata dalam dunia kerja yang relavan dengan bidang administrasi publik.

    Soft skill tersebut menjadi pengalaman penting yang dapat mendukung kesiapan penulis dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang.

F. Analisis Berdasarkan Teori George C. Edwards III

Teori implememtasi kebijakan yang digunakan dalam artikel ini adalah teori George C. Edwards III. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Mubarok et al., 2020).

1. Komunikasi (*comunication*)

   Komunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi kepada pelaksana maupun masyarakat. Komunikasi yang baik dapat membantu pelaksanaan program berjalan lebih efektif karena masyarakat dan pelaksana memahami tujuan program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, komunikasi dilakukan melalui kegiatan Musrenbang, Pokir, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi sarana penyampaian informasi mengenai Program Keluarga Berencana dan pencegahan stunting kepada masyarakat.

2. Sumber Daya (*resource*)

   Sumber daya meliputi sumber daya manusia, data, sarana administrasi, dan teknologi pendukung lainnya. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam kegiatan ini, sumber daya yang digunakan meliputi aparatur Bidang KBKK, data Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta perangkat administrasi seperti Microsoft Excel dan Microsoft Word. Data yang akurat membantu proses perencanaan dan evaluasi program keluarga berencana.

3. Disposisi Pelaksana (*dispotition*)

   Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi akan lebih mampu mendukung pelaksanaan program secara optimal. Dalam pelaksanaan kegiatan, aparatur Bidang KBKK menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, koordinasi kegiatan, serta penyusunan laporan program. Sikap tersebut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

   Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas dan mekanisme kerja dalam organisasi. Struktur birokrasi yang jelas dapat membantu koordinasi antarbagian sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Bidang KBKK memiliki tugas sebagai unit pendukung administrasi dan koordinasi kegiatan

program. Pembagian tugas yang jelas membantu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah dan sistematis.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Oleh karena itu, penguatan pada keempat faktor tersebut diperlukan agar pelaksanaan Program Keluarga Berencana dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

G. Dampak Kegiatan

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak yang signifikan bagi penulis, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman kerja. Dari segi pengetahuan, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem administrasi dalam instansi pemerintah berjalan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Penulis juga memahami bahwa peran sekretariat memiliki kontribusi penting dalam menunjang keberhasilan program. Dari segi keterampilan, penulis memperoleh pengalaman dalam pengelolaan data, penyusunan laporan, serta penggunaan perangkat lunak seperti *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word*. Keterampilan ini sangat penting dalam mendukung pekerjaan di bidang administrasi. Selain itu, penulis juga mengalami peningkatan dalam kemampuan komunikasi dan kerja sama tim selama berinteraksi dengan pegawai di lingkungan instansi. Dari segi pengalaman, keterlibatan dalam kegiatan Musrenbang dan Pokir memberikan gambaran nyata mengenai proses perencanaan program di tingkat daerah. Penulis dapat melihat secara langsung bagaimana data disiapkan, administrasi dikelola, serta koordinasi dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik. Pengalaman ini menjadi bekal yang sangat berharga dalam memahami praktik administrasi publik secara langsung.

Selain memberikan manfaat bagi penulis, kegiatan pengabdian juga memberikan kontribusi bagi instansi, terutama dalam membantu kegiatan administrasi dan pengelolaan data. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga mendukung pelaksanaan program di instansi. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam meningkatkan kompetensi penulis sebagai mahasiswa administrasi negara. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja serta memahami peran administrasi publik dalam pelaksanaan program pemerintah. Dampak kegiatan pengabdian juga terlihat dari meningkatnya pemahaman penulis terhadap implementasi kebijakan publik secara langsung di lapangan. Melalui keterlibatan dalam kegiatan Musrenbang dan Pokir, penulis dapat memahami bahwa pelaksanaan program tidak hanya dilakukan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi juga melalui proses perencanaan, koordinasi, dan penganggaran yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Kegiatan pengabdian juga memberikan

pengalaman dalam memahami pentingnya peran unit pendukung seperti Bidang KBKK dalam menunjang keberhasilan program. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pelayanan, peran dalam pengelolaan data, administrasi, dan koordinasi terbukti sangat penting dalam memastikan program dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksana utama, tetapi juga oleh sistem pendukung yang berjalan di dalam instansi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK) memiliki peran penting sebagai sekretariat dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Peran tersebut meliputi pengelolaan administrasi, penyediaan data, serta koordinasi kegiatan yang menjadi bagian penting dalam menunjang kelancaran program. Keterlibatan dalam kegiatan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok Pikiran (Pokir) menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya dilakukan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi juga melalui proses perencanaan dan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu, pengelolaan data, khususnya data Tim Pendamping Keluarga (TPK), menjadi aspek penting dalam mendukung pelaksanaan program agar berjalan secara efektif dan terarah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti pengelolaan data yang belum sepenuhnya optimal serta koordinasi antarunit kerja yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan agar instansi dapat meningkatkan sistem pengelolaan data agar lebih terintegrasi dan akurat, sehingga dapat mendukung proses perencanaan dan evaluasi program dengan lebih baik. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antarunit kerja agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang administrasi dan pengelolaan data juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan guna menunjang keberhasilan Program Keluarga Berencana di masa mendatang.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai penerapan sistem administrasi dan pengelolaan data berbasis digital dalam mendukung implementasi Program Keluarga Berencana, sehingga dapat diketahui efektivitasnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan, akurasi data, serta koordinasi antarunit kerja. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa kabupaten atau kota sebagai objek kajian agar diperoleh perbandingan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan model atau rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas administrasi, koordinasi, dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Amalia Lifianti, K. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI INDONESIA. In *Jurnal Inovasi Sektor Publik* (Vol. 1).

Atoul Ibad, D., & Megawati, S. (n.d.). *PROGRAM KELUARGA BERENCANA: STUDI IMPLEMENTATIF TERHADAP PENDEKATAN KOMUNIKASI PUBLIK "EDWARD III" DI KOTA KEDIRI*.

Azizah[1], A. K., Azkiya[2], F. M., & Puteri[3], A. P. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS KEDUNGDORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA* (Vol. 10, Number 1).

Creswell, J. W. (2009). *RESEARCH DESIGN Qualitative, QUantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Febriyani Tiffani, W., Rifai, M., Studi Ilmu Pemerintahan, P., & Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang, F. (2020). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM UPAYA MENEKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KELURAHAN SUMUR BATU KECAMATAN BANTAR GEBANG KOTA BEKASI* (Vol. 7, Number 3). Bulan Desember Tahun.

Hernitawati, & Pasaribu Azhar Y I M. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*. http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index

Irsyadillah, A. N., Syafingi, H. M., Noviasari, D. T. , & Dewi, D. A. S. (2025). Efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam penyerapan aspirasi masyarakat. *Borobudur Law and Society Journal*, *4*. https://doi.org/10.31603/14115

Karodita Sari, K., Irawan, B., & Apriani, F. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA GERBANG SERIBU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI DAMA KOTA SAMARINDA*.

Rahim, I. (n.d.). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *9*(1), 2023. https://doi.org/10.33506/jf.v9i1.2306

Kurniasih, D., Tobirin, & Setyoko, P. I. (2023). PENGARUH FAKTOR DETERMINAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS. *PUBLIC POLICY AND MANAGAMENT INQUIRY*, *7*.

Moonti, U., Dai, I. S., & Darin. (n.d.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa*.

Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. In *Syahrul Mubarok/ JPAS* (Vol. 5, Number 1).

Nuna, M., Tabo, S., Podungge, A. W., Napir, S., Sahi, N. A., Arsjad, Muh. F., Bilondatu, A., Kodai, D. A., Amu, R. W., Kasin, M. A., Lamuda, D. P., Erawan, Moh. A., Bilondatu, N., Biongan, A., Pakaya, F., & Jumriani, J. (2026). PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DI DESA PINOMONTIGA KECAMATAN BULAWA.

Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, *7*(2), 75–90. https://doi.org/10.37858/aktivasi.v7i2.686

Pradnyani, P. E., Indrayathi, P. A., Kadek, L., Swandewi, R., Kesehatan, P., & Bali, K. (2023). HUBUNGAN PAPARAN INFORMASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TERHADAP PENGETAHUAN DAN PENERIMAAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR. In *Jurnal Keluarga Berencana* (Vol. 8, Number 1). https://www.openepi.com/SampleSize/SSP

Purwaningsih, M. R. (2022). PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, *6*(1), 151–164. https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346

Pusnita Indah, Lubis Bangun Paruhuman, Rengki, Ningrum Retno Dewi, & Ninda Nadia Ayu. (2022). *STRATEGI PEMASARAN PANDAI BESI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MANDI ANGIN*. https://doi.org/https://doi.org/10.37858/aktivasi.v5i1

Rahmawati Emha, M., Novitasari Wijaya, L., Studi ilmu Keperawatan, P., Madani, S., & Wonosari km, J. (2024). KESEHATAN REPRODUKSI: EFEK PROGRAM KELURGA BERENCANA (KB) TERHADAP WANITA USIA SUBUR Reproductive Health: The Effect Of Contraception On Childbearing Age Women. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, *15*(01).

Susana, A., Dona, S., & Hestiana, N. (n.d.). *Implementation of the Family Planning Contraceptive Method Program Long Term at the Murung Pudak Health Center*.

Telaumbanua, E., Kintoko Rochadi, R., Ketaren, O., Silitonga, E. M., Sinaga, J., & Sinaga, T. R. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KAMPUNG KB) DI KABUPATEN NIAS UTARA*.

Utomo, A., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (n.d.). *STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANGGA KENCANA KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG*. Retrieved www.fisip.undip.ac.id